

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pariwisata memiliki pengaruh ekonomi, sosial dan kebudayaan dari adanya perjalanan wisata. Pitana (2009:2) dalam (Cahyaningrum, 2018) mengungkapkan bahwa pariwisata berperan penting dalam pengembangan ekonomi di berbagai negara. Pariwisata dijadikan sebagai sektor unggulan dalam memperoleh devisa, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia, pemerintah sudah menjadikan pembangunan di bidang pariwisata sebagai bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 4 dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, mengatasi pengangguran, menghapus kemiskinan, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya dan memajukan kebudayaan, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, menanamkan rasa cinta tanah air, mengangkat citra bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Pemerintah memiliki lima Destinasi Super Prioritas (DSP) yang dikembangkan sebagai bentuk perwujudan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025 yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011. Peraturan tersebut menjadi landasan pada pembangunan pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi serta menciptakan

industri pariwisata yang dapat menggerakkan perekonomian nasional. Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia tahun 2020-2024. RPJMN tersebut menjelaskan bahwa melalui 5 DSP ini pemerintah menargetkan pada tahun 2024 kontribusi dari sektor pariwisata meningkatkan PDB menjadi 5,5%, devisa dari sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD, serta jumlah wisatawan Nusantara mencapai 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (5 Destinasi Super Prioritas, 2022).

Kelima Destinasi Super Prioritas, yaitu Candi Borobudur, Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, dan Likupang mempunyai berbagai keunikan, potensi dan daya tarik wisata yang besar, namun masih perlu dikembangkan dan terus dioptimalkan. Candi Borobudur merupakan salah satu dari 5 DSP yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selain Candi Borobudur, Kecamatan Borobudur sendiri memiliki berbagai potensi wisata, meliputi potensi wisata alam dan budaya. Hal tersebut mendukung kawasan Borobudur sebagai salah satu daerah tujuan wisata internasional dan destinasi utama di Jawa Tengah. Berikut merupakan jumlah kunjungan wisatawan Candi Borobudur yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pengunjung Candi Borobudur Tahun 2020-2022

Bulan	Pengunjung Candi Borobudur					
	Domestik			M mancanegara		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Januari	395175	30394	131561	15603	52	127
Februari	234280	18641	89203	11506	37	170
Maret	111908	34624	111540	4213	33	348
April	-	30713	23890	-	64	618
Mei	-	38369	324135	-	55	2175
Juni	2235	54589	191810	2	70	4341
Juli	16858	0	125266	29	0	1184
Agustus	45571	0	51906	39	0	15550
September	23591	5892	44552	19	9	9853
Oktober	43159	30285	76461	38	93	7688
November	32449	51485	74253	26	106	4941
Desember	60473	127938	198709	76	155	6941
Kabupaten Magelang	965 699	422 930	1 443 286	31 551	674	53 936

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Berdasarkan tabel di atas, total jumlah wisatawan di Candi Borobudur baik domestik maupun mancanegara setelah pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Adanya potensi-potensi tersebut seharusnya mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sarana efektif dalam mendorong pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Namun, Kabupaten Magelang saat ini masih menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar jumlah

penduduk miskin di Jawa Tengah dengan menduduki peringkat ke-21 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2022 (BPS Jawa Tengah, 2022). Terlihat pada Diagram 1.1 bahwa Kabupaten Magelang dibandingkan dengan kabupaten dan kota di sekitarnya menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 154,91 ribu jiwa.

Diagram 1.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sekitar Kabupaten Magelang Pada Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Diolah Peneliti

Kecamatan Borobudur menjadi salah satu penyumbang jumlah keluarga pra sejahtera yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Magelang, yaitu menduduki peringkat ke 3 se-Kabupaten Magelang (Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2020

Kecamatan di Kabupaten Magelang	Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Magelang
	Pra Sejahtera
	2020
Salaman	5541
Borobudur	5723
Ngluwar	1321
Salam	1652
Srumbung	2453
Dukun	2161
Muntilan	2678
Mungkid	4768
Sawangan	4117
Candimulyo	4367
Mertoyudan	3323
Tempuran	3803
Kajoran	5486
Kaliangkrik	5364
Bandongan	4207
Windusari	4106
Secang	3209
Tegalrejo	2226
Pakis	6013
Grabag	6828
Ngablak	2831
Kabupaten Magelang	82177

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Salah satu alternatif pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan membangun masyarakat pedesaan melalui sektor pariwisata. Per Maret 2023, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 14,16 juta penduduk miskin berada di pedesaan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat

pedesaan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka memecahkan permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata dikenal dengan sebutan *Community Based Tourism* (CBT), yaitu bentuk pengelolaan pariwisata oleh masyarakat lokal yang menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wisatawan agar dapat mengetahui bagaimana tata cara hidup masyarakat lokal. Selain itu, CBT juga bertujuan untuk membangun dan memperkuat kemampuan organisasi masyarakat lokal (Pradana, 2019).

Salah satu bentuk penerapan CBT adalah pendirian desa wisata. Pada website resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (kemenkopmk.go.id), data menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 74.958 desa dengan potensi sumberdaya alam klasifikasi wisata sebanyak 1.902 desa yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai desa wisata (Christine, 2019). Desa wisata menunjukkan keaslian arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa, sosial budaya, keseharian serta adat istiadat dalam mengembangkan kawasan pedesaan yang dikemas dalam atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung (Darsono dalam Muntaz dan Karmilah, 2021). Desa wisata sendiri menjadi program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Payung hukum terkait desa wisata tertuang dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang PNPM Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata yang diubah menjadi Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang PNPM Mandiri Pariwisata. Pada tahun 2014, terdapat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berpengaruh terhadap

peningkatan signifikan jumlah desa wisata secara nasional. Kemudian, dasar hukum pemberdayaan desa wisata di Kabupaten Magelang berpedoman pada Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Pergub Jawa Tengah No. 53 Tahun 2019 tentang Juklak Perda No. 2 Tahun 2019, serta Perda Kabupaten Magelang No. 4 Tahun 2015 tentang RIPPARDA.

Pada tahun 2021, Kabupaten Magelang memiliki 57 desa wisata yang tersebar di 19 kecamatan (magelangkab.go.id). Sudah terdapat 34 desa wisata yang memiliki SK Bupati (6 desa wisata dengan SK penancangan dan 28 desa wisata dengan SK penetapan), sedangkan 23 desa wisata masih belum memiliki SK (perintisan). Saat ini, pengembangan desa wisata di wilayah Kabupaten Magelang juga diarahkan untuk menguatkan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur (Saputra, 2021). Di Kecamatan Borobudur terdapat 20 desa dan ke 20 desa tersebut telah menjadi desa wisata. Gerakan sadar wisata ini melibatkan partisipasi berbagai pihak dengan pokdarwis (kelompok sadar wisata) sebagai aktor penggerak kepariwisataan desa (Dhaniswara, 2022).

Desa wisata pertama yang menjadi pelopor desa wisata di Kabupaten Magelang yaitu Desa Wisata Candirejo yang diresmikan pada tahun 2003 oleh Bapak I Gede Ardika selaku Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Republik Indonesia. Desa Wisata Candirejo dijadikan sebagai *pilot project* desa wisata di Kabupaten Magelang pada tanggal 31 Mei 1999 melalui SK Bupati Magelang No. 556/1258/19/1999 dan ditetapkan menjadi Desa Binaan Wisata Tingkat Kabupaten Magelang. Program desa wisata ini mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian

serta membuka lapangan pekerjaan baru dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tercapai kemandirian serta kemajuan desa.

Akan tetapi, pemberdayaan masyarakat pada Program Desa Wisata Candirejo masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 sebanyak 1.270 warga Desa Candirejo atau sekitar 27,2% dari jumlah seluruh masyarakat Desa Candirejo masih belum/tidak bekerja/mengurus rumah tangga/pensiunan yang terlihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Desa Candirejo Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2020

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja/Mengurus Rumah Tangga/Pensiunan	1.207
2	Pelajar/Mahasiswa	744
3	PNS/TNI/Polri	53
4	Perdagangan/Pedagang	53
5	Petani/Pekebun/Peternak/Perikanan	939
6	Karyawan Swasta	990
7	Karyawan BUMN/BUMD/Honorer	7
8	Buruh/Pembantu Rumah Tangga	172
9	Dosen/Guru	35
10	Wiraswasta	163
11	Lainnya	75
	Total	4.438

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Borobudur Dalam Angka 2021

Tingginya jumlah masyarakat pra sejahtera di Desa Candirejo dapat disebabkan belum menyeluruhnya pemberdayaan masyarakat Desa Candirejo karena Program Desa Wisata Candirejo sudah berjalan cukup lama sejak diresmikan pada tahun 2003, sehingga perlu dikaji terkait implementasi program.

Pentingnya kajian mengenai Program Desa Wisata Candirejo perlu berkaca pada pengembangan-pengembangan Program Desa Wisata lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurwanda, Setiyono, & Wijayanto, 2022) memaparkan bahwa Desa Wisata Pandanrejo di Kabupaten Purworejo mampu berkembang dengan pesat melalui pengoptimalan potensi yang dimiliki dan menjadi bagian dalam 50 Desa Wisata Unggulan Kemenparekraf pada tahun 2021. Pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Pandanrejo dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap sosialisasi, transformasi kemampuan dan kemandirian dalam rangka mewujudkan arah pemberdayaan yang tepat dan menyesuaikan pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan serta kategori penilaian pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021 untuk mengembangkan tiap aspek yang ada. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Saepudin, Budino, & Halimah, 2022) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan mampu meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa wisata di Cibodas, salah satunya dalam hal pengelolaan *homestay*, pelayanan prima dan media promosi.

Sedangkan kajian penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai Program Desa Wisata Candirejo umumnya lebih berfokus pada dampak positif dari desa wisata, sehingga belum mengevaluasi program tersebut secara menyeluruh. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Farhan, 2018) yang membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat pengembangan Desa Wisata Candirejo serta dampak positif yang ditimbulkan dari adanya desa wisata. Kemudian, (Hidayah & Agustinah, 2019) dalam penelitiannya membuktikan

keberhasilan Balkondes Candirejo dalam menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Desa Candirejo. Selain itu, dijelaskan bahwa adanya Balkondes dan Desa Wisata Candirejo berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Candirejo, dilihat dari sebelum dan sesudah adanya Balkondes.

Dengan demikian, berdasarkan data-data yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa kawasan Candi Borobudur sebagai objek wisata tunggal Tanah Air yaitu destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan memiliki potensi kunjungan wisata yang tinggi. Melihat potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Magelang semakin menggerakkan desa-desa di Kecamatan Borobudur dalam mengoptimalkan pengembangan Program Desa Wisata yang diharapkan mampu menunjang perekonomian di desa-desa sekitar Candi Borobudur. Letak Desa Candirejo yang berdekatan dengan Candi Borobudur dan dijadikan sebagai *pilot project* pengembangan desa wisata di Kabupaten Magelang saat ini masih memiliki jumlah keluarga pra sejahtera yang tinggi dimana masih terdapat banyak masyarakat Desa Candirejo yang belum memiliki pekerjaan. Hal inilah yang menjadi *gap* penelitian sebagai dasar peneliti untuk menganalisis apakah Program Desa Wisata Candirejo berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pengelola Desa Wisata Candirejo serta Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengimplementasikan program-program prioritas, terutama program pemberdayaan masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Program Desa Wisata Candirejo sudah berjalan cukup lama sejak diresmikan pada tahun 2003, tetapi pemberdayaan masyarakat Desa Candirejo di sektor pariwisata belum menyeluruh.
- b. Masih terdapat banyak masyarakat Desa Candirejo yang belum/tidak memiliki pekerjaan.

1.3. Rumusan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana evaluasi Program Desa Wisata Candirejo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang?
- 1.3.2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Desa Wisata Candirejo?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Mengkaji dan menganalisis evaluasi Program Desa Wisata Candirejo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

1.4.2 Mengkaji dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Desa Wisata Candirejo.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian analisis evaluasi suatu program terhadap ketercapaian sasaran program. Kemudian, konsep dan teori pada penelitian ini juga diharapkan mampu menguraikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sehingga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca, khususnya dalam bidang administrasi publik.

1.5.2. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengkajian ulang terhadap cara yang ditempuh dalam mengikutsertakan masyarakat pada program pemerintah dan menggandeng seluruh *stakeholders* dalam mendukung keberjalanan program. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong

pemikiran dan sikap kritis dari pemerintah, swasta dan masyarakat atas potensi SDM dan SDA yang harus terus digali kebermanfaatannya dan dikembangkan untuk dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Penulis, Tahun Terbit	Metode dan Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Evaluasi Dukungan DAK Fisik Bidang Pariwisata bagi Pembangunan Daerah: Studi Kasus Nasional dan Provinsi Jawa Timur oleh Andi Setyo Pambudi dan Desak Made Annisa Cahya Putri (2022)	Pendekatan mixed method melalui analisis big data.	Untuk menilai pengaruh DAK Fisik dalam pembangunan sektor pariwisata daerah dan untuk menganalisis permasalahan yang dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan media.	Terdapat kesesuaian antara prioritas nasional yang berkaitan dengan pariwisata dan kebutuhan daerah. Afeksi publik pada bidang ini cenderung netral, sehingga sektor pariwisata memiliki kelayakan untuk terus dikuatkan dan didorong melalui dana transfer khusus dalam mempercepat ketertercapain target-target pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
2.	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Pantai Ngliyep Kabupaten	Metode deskriptif kualitatif menggunakan teori William N. Dunn.	Untuk mengetahui hasil evaluasi kebijakan dari Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Pantai Ngliyep, Desa Kedungsalam,	Terdapat partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait dalam upaya pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Malang. Ketua Pengelola Pantai Ngliyep terus melakukan usaha dalam memaksimalkan promosi

No.	Judul Penelitian, Penulis, Tahun Terbit	Metode dan Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
	Malang (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang) oleh Galuh Rimadevi, Lely Indah Mindarti, Imam Hanafi (2022)		Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.	wisata melalui berbagai media. Wisata Pantai Ngliyep sangat mempengaruhi peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Desa Kedungsalam, seperti memberi lapangan kerja dan lebih melestarikan budaya serta tradisi masyarakat setempat.
3.	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu oleh Arif Rahman (2022)	Metode deskriptif kualitatif dengan teori William N. Dunn.	Untuk mengetahui efektifitas dalam implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) berperan dalam menyediakan modal usaha bagi masyarakat Kecamatan Kilo dan mampu memberdayakan masyarakat pesisir. Ukuran keberhasilan dari implementasi PEMP di Kecamatan Kilo apabila dilakukan sosialisasi dan implementasi yang massive, tidak hanya di Kecamatan Kilo, tetapi juga sampai ke desa-desa lainnya.
4.	Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Ternak “Lancar Rejeki” oleh Beti Nur Hayati (2020)	Metode kualitatif menggunakan Beneficiary Assesment.	Untuk mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat kelompok ternak “Lancar Rejeki” pada periode tahun 2015-2018 menggunakan Beneficiary Assesment.	Dampak yang ditimbulkan dari program pemberdayaan masyarakat kelompok ternak “Lancar Rejeki” yaitu meningkatnya kapasitas anggota kelompok terkait program fattening ternak serta meningkatnya ekonomi para anggota dimana

No.	Judul Penelitian, Penulis, Tahun Terbit	Metode dan Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
				mereka memiliki kapasitas untuk mengolah limbah ternak menjadi pupuk organik. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program ini, yaitu fluktuasi harga kambing yang tidak menentu berdampak pada sulitnya pengembangan kegiatan fattening. Selain itu, lemahnya modal sosial antar anggota kelompok berdampak pada berhentinya beberapa anggota kelompok ketika merintis kegiatan.
5.	Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Karawang oleh Hanny Purnamasari dan Rachmat Ramdani (2019)	Metode deskriptif kualitatif menggunakan teori Dunn (2003).	Untuk mengetahui evaluasi program BUM Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang.	Evaluasi program BUM Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang masih belum efektif yang dilihat dari belum tercapainya tujuan pendirian BUM Desa.
6.	Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Mawar Sejadi di Kelurahan Sijambi	Metode deskriptif kualitatif.	Untuk mengetahui evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah Mawar Bestari di Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai dan	Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Mawar Bestari di Kelurahan Sijambi berjalan cukup optimal yang dilihat dari ketercapaian tujuan evaluasi yaitu mampu

No.	Judul Penelitian, Penulis, Tahun Terbit	Metode dan Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
	Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai oleh Maria Santifa, Warjio Warjio, Dumasari Harahap, Isnaini Isnaini (2019)		untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat evaluasi program ini.	menciptakan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak kelurahan dalam melaksanakan program Bank Sampah, kemudian pemanfaatannya juga sangat dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Sijambi.

Sumber: Olahan Penulis dari Berbagai Sumber, 2023

Kajian literatur pada tabel di atas mengangkat permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan evaluasi berbagai program pemerintah, terutama dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan maupun program disebabkan oleh berbagai faktor yang berbeda. Melalui evaluasi, diketahui bahwa belum sepenuhnya kebijakan/program mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sehingga hasil dari sebuah evaluasi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan-perbaikan kedepannya. Dengan demikian, adanya evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan/program sangat penting untuk mengetahui keselarasan antara tujuan program dengan hasil yang sudah dicapai.

Perbedaan antara masing-masing penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teori evaluasi yang digunakan untuk melihat peran program dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian evaluasi menurut Kendall (1992). Pemilihan teori tersebut

didasarkan pada tujuh indikator evaluasi program yang mampu menjelaskan secara komprehensif dalam mengevaluasi Program Desa Wisata Candirejo. Sehingga, tidak hanya melihat pada sisi kepentingan organisasi saja, tetapi juga melihat proses keberlangsungan program dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang bersangkutan.

1.6.2. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam (Keban, 2014) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses pengorganisasian dan pengkoordinasian pegawai publik dalam melakukan formulasi, implementasi, serta pengelolaan suatu keputusan publik dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui perbaikan-perbaikan di berbagai bidang. Nicholas Henry dalam (Keban, 2014) menjabarkan ruang lingkup administrasi publik yang dilihat dari unsur-unsur berikut:

- a. Organisasi publik: berhubungan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen publik: berhubungan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, serta manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi: berkaitan dengan pendekatan terhadap kebijakan publik beserta implementasinya, swastanisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Administrasi publik memiliki pengaruh yang krusial dalam penyelenggaraan suatu negara. Frederick A. Cleveland dalam (Keban, 2014) mengungkapkan bahwa peran administrasi publik sangat penting dalam menciptakan demokrasi dan memberdayakan masyarakat melalui pelayanan publik yang diberikan. Sejalan dengan hal tersebut, Rondinelli dalam (Keban, 2014) mengatakan bahwa saat ini peran pemerintah harus ditujukan pada pelayanan masyarakat agar tercapai *democratic governance*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik memiliki peran untuk mengelola sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang berkenaan dengan pelayanan publik dan penyediaan barang-barang publik. Kegiatan tersebut memerlukan profesionalitas kinerja pemerintah dan kerjasama yang baik antar *stakeholders* dalam mengatasi permasalahan-permasalahan publik. Dapat dilihat bahwa salah satu kegiatan dalam administrasi publik berkaitan dengan pelaksanaan program-program pembangunan dalam upaya meningkatkan perekonomian. Hal tersebut berhubungan dengan penelitian ini yaitu menyangkut program pemberdayaan masyarakat pedesaan pada sektor pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik menurut Nicolas Henry dalam (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020) yaitu:

a. Paradigma I: *The Politics – Administration Dichotomy* (1900 – 1926)

Paradigma ini mengasumsikan pemisahan fungsi politik dan fungsi administrasi (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020). Goodnow dalam (Taufiqurokhman, 2018) mengemukakan bahwa fungsi politik berhubungan dengan pembuatan kebijakan atau tujuan dan keinginan negara. Sedangkan fungsi administrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan yang telah disusun untuk menjalankan fungsi politik.

b. Paradigma II: *The Principles of Administration* (1927-1937)

Paradigma ini berfokus pada prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal pada setiap lingkungan sosial budaya dan berbagai bentuk organisasi. W.F. Luther H. Gulick and Lyndall Urwick dalam (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020) mengemukakan prinsip-prinsip administrasi negara dengan istilah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*).

c. Paradigma III: *Public Administration as Political Science* (1950-1970)

Paradigma ini dianggap sebagai upaya untuk mengkaji kembali keterkaitan konseptual antara politik dan administrasi publik. Administrasi publik hanya membahas mengenai satu wilayah kepentingan, bahkan memiliki kesamaan dengan ilmu politik. Sehingga, fokus administrasi publik dalam menggali prinsip-prinsip administrasi pada tahapan ini semakin berkurang (Taufiqurokhman, 2018).

d. Paradigma IV: *Public Administration as Management* (1956-1970)

Pada paradigma ini, manajemen berhasil membawa administrasi publik sebagai bagian dari ilmu manajemen. Ilmu manajemen lebih berdasar pada hasil penelitian dari para pakar analisis sistem, ekonom, statistik dan administrasi publik dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020).

e. Paradigma V: *Public Administration as Public Administration* (1970-sekarang)

Tahap ini merupakan tahap *New Public Management* (NPM). Pada paradigma ini, administrasi publik berdiri sendiri sebagai bidang studi keilmuan. Paradigma NPM adalah pergeseran orientasi yang berfokus pada hierarki dan birokrasi menjadi pasar dan organisasi sektor swasta dengan konsep model bisnis (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020).

f. Paradigma VI: *Governance* (1990-sekarang)

Perubahan persepsi pemerintah dan administrasi selama paradigma ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- Globalisasi: melibatkan isu lingkungan di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan multi nasional, perdagangan internasional, dan pemanfaatan IPTEK.

- Redefinisi: pemerintah melibatkan kolaborasi dan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
- Devolusi: adanya partisipasi swasta, sektor nirlaba, masyarakat, otoritas publik, asosiasi pemerintah, dan lain sebagainya (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020).

Dengan demikian, administrasi publik beralih dari mengendalikan masyarakat menjadi melayani masyarakat. Berdasarkan paradigma di atas, dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma VI. Partisipasi para *stakeholders* terutama peran aktif dari masyarakat Desa Candirejo sangat diperlukan dalam keberhasilan Program Desa Wisata Candirejo. Mereka memiliki wewenang untuk mengendalikan suatu lembaga dengan tujuan untuk membangun dan memperkuat kemampuan organisasi masyarakat lokal, sehingga manajemen publik sangat berperan dalam hal ini.

1.6.3. Manajemen Publik

Solihin dalam (Hamid, 2018), mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Elemen fungsi manajemen menurut Siswanto dalam (Pathony, 2019) yaitu terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pemasalahan, serta Pengendalian/Pengawasan.

Studi yang mempelajari cara manusia dalam melakukan manajemen pada organisasi sektor publik disebut sebagai manajemen publik. Wijaya dan Damar

(2014) berpendapat bahwa manajemen publik memiliki tugas pokok dalam mengembangkan pemahaman terhadap sistem administrasi dan manajemen pada sektor publik dan organisasi nirlaba. Manajemen publik berfokus pada internal organisasi sektor publik dengan mengatur organisasi secara optimal untuk mencapai sasaran organisasi dengan tetap memperhatikan faktor eksternal organisasi (Wijaya & Danar, 2014).

Menurut Ott, Hyde dan Shafritz dalam (Wijaya & Danar, 2014), manajemen publik merupakan cabang dari administrasi publik yang secara khusus membahas keilmuan mengenai manajemen keuangan, alokasi sumberdaya melalui sistem penganggaran, desain program dan restrukturisasi organisasi, serta manajemen SDM dan evaluasi program dan audit. Sedangkan Overman dalam (Satibi, 2012) mengungkapkan bahwa manajemen publik merupakan gabungan studi antara fungsi manajemen dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik. Kemudian, Satibi (2012) berpendapat bahwa manajemen publik merupakan pengelolaan pada sektor publik oleh pemerintah yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, strategi maupun evaluasi terhadap sumber daya yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Sehingga, manajemen publik berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang sangat rumit dan kompleks.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai konsep manajemen publik, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan upaya dalam mengelola sumber daya organisasi sektor publik berdasarkan pada fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis salah satu dari fungsi

manajemen yaitu evaluasi yang dipakai peneliti dalam mengkaji sejauh mana tujuan program telah dicapai.

1.6.4. Evaluasi Program

1. Definisi dan Konsep Evaluasi Program

Dunn dalam (Rimadevi, Mindarti, & Hanafi, 2022) mengungkapkan definisi evaluasi sebagai kegiatan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkaitan dengan manfaat dan nilai dari hasil kebijakan, sehingga dapat diketahui seberapa jauh ketercapaian nilai, kesempatan dan kebutuhan. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Suchman dalam (Kaharuddin & Rusli, 2021) bahwa evaluasi merupakan proses dalam menentukan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat tiga jenis evaluasi berdasarkan *timing*-nya menurut Dunn dalam (Rimadevi, Mindarti, & Hanafi, 2022), yaitu evaluasi sebelum pelaksanaan program (evaluasi summatif), evaluasi pada saat pelaksanaan program (evaluasi proses) dan evaluasi setelah pelaksanaan program (evaluasi *output*).

Evaluasi kebijakan lebih berkaitan dengan kinerja atau program suatu kebijakan khususnya pada implementasi kebijakan publik (Rimadevi, Mindarti, & Hanafi, 2022). Program merupakan segala aktivitas yang direncanakan untuk melangsungkan suatu kebijakan dan dilakukan untuk waktu yang tidak terbatas, sehingga program perlu dievaluasi dengan tujuan untuk menunjukkan apakah

layanan yang diberikan sudah mencapai sasaran (Kaharuddin & Rusli, 2021). Wirawan dalam (Kaharuddin & Rusli, 2021) mengungkapkan definisi evaluasi program sebagai sebuah pola tersusun dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan hasilnya untuk menjawab pertanyaan dasar terkait program. Sejalan dengan pendapat tersebut, H. Weiss Carol dalam (Kaharuddin & Rusli, 2021) mengatakan bahwa evaluasi program merupakan pola yang terencana dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga melalui informasi tersebut dapat dijadikan jawaban dari pertanyaan seberapa tingkat keefektifan dan efisiensi dari suatu kebijakan, proyek, maupun program.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program ditujukan untuk menilai sejauh mana pencapaian suatu program apabila dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi program dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program agar sesuai dengan harapan berdasarkan responsivitas pihak yang terlibat dalam implementasi program tersebut. Tahap evaluasi menjadi hal yang esensial untuk memantau pelaksanaan program dan dilaksanakan secara berkala karena tidak semua program dari sebuah kebijakan publik sukses mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengukur keberhasilan program, perlu dikaji melalui beberapa indikator karena penggunaan indikator yang tunggal akan berdampak pada hasil penilaian yang bias dari yang sesungguhnya.

2. Model Evaluasi Program

- a. Model Evaluasi CIPP oleh Stufflebeam dan Shinkfield dalam (Kurniawati, 2021)

Model evaluasi CIPP memfokuskan evaluasi pada empat indikator, yaitu:

- Evaluasi *Context*: pada tahap ini evaluasi difokuskan pada perencanaan. Evaluasi mengutamakan identifikasi kebutuhan yang dijadikan dasar dalam penentuan atau pengembangan suatu program.
- Evaluasi *Input*: pada tahap ini dipersiapkan segala hal yang dinilai akan berpengaruh terhadap pelaksanaan evaluasi, seperti penentuan sumber daya yang diperlukan, pencarian *alternative way* yang dapat dilaksanakan, perencanaan yang matang, penyusunan strategi yang akan dilaksanakan, biaya, peralatan dan perlengkapan pendukung.
- Evaluasi *Process*: pada tahap ini berhubungan dengan implementasi program. Pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan rencana program, hambatan yang dihadapi dan solusinya harus mampu dijawab dalam proses pelaksanaan evaluasi ini.
- Evaluasi *Product*: pada tahap ini evaluasi hasil digunakan untuk menentukan keputusan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Evaluasi hasil berhubungan dengan dampak dan manfaat program setelah evaluasi dilaksanakan.

b. Kategori Evaluasi oleh Kendall (1992)

Evaluasi program menurut Kendall (1992) dalam (Dwihantoro & Rosyidi, 2020) dibagi menjadi tujuh indikator sebagai patokan dalam melihat keefektifan program, yaitu:

- *Goal achievement* (pencapaian sasaran): pada tahap ini dilakukan pengukuran mengenai sejauh mana tujuan-tujuan program yang telah disusun dapat tercapai.
- *Measurement of improvement* (pengukuran perbaikan): pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap perbaikan-perbaikan yang telah berlangsung pada sikap dan pengetahuan publik. Pada awalnya telah diamati terkait situasi yang sudah terjadi, kemudian dievaluasi apakah situasi tersebut telah mengalami perbaikan.
- *Measurement of result* (pengukuran hasil): hasil pada tahap ini tidak menyertakan pencapaian tujuan yang telah disusun, tetapi lebih menekankan pada hasil namun belum menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan program.
- *Cost efficiency* (efisiensi biaya): pada tahap ini memiliki tujuan untuk mengukur kesuksesan program dengan penghitungan pendapatan yang telah didapatkan dibandingkan dengan usaha-usaha atau jumlah pengeluaran.

- *Organizational change* (perubahan organisasi), pada tahap ini meliputi evaluasi terhadap organisasi sebagai hasil dari program. Upaya yang dilaksanakan organisasi untuk mempengaruhi publik justru seringkali berpengaruh terhadap perubahan pada organisasi itu sendiri.
- *Unplanned result* (efek yang tidak terencana), pada tahap ini akan mengamati hasil-hasil sampingan sebagai akibat adanya program yang tidak direncanakan.
- *Unarticulated hopes* (harapan-harapan yang tidak terartikulasi), pada tahap ini berhubungan dengan harapan-harapan berlebih dari pihak manajemen terhadap tujuan program, namun harapan ini tidak terartikulasi dengan baik. Untuk itu, dalam membuat tujuan program harus diidentifikasi dengan jelas seluruh harapan pihak manajemen terhadap program yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian model evaluasi program di atas, peneliti akan menggunakan indikator evaluasi oleh Kendall (1992) karena melihat evaluasi program secara komprehensif dari berbagai dimensi melalui tujuh indikator, sehingga mampu mendapatkan hasil evaluasi secara lebih mendetail.

1.6.5. Program Desa Wisata

Yeoti dalam Zakaria dalam (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020) mendefinisikan desa wisata sebagai daerah pedesaan yang dapat dijadikan tujuan wisata karena mempunyai daya tarik khusus. Masyarakat desa wisata masih

melestarikan tradisi dan budaya secara turun-temurun serta masih terdapat beberapa aktivitas seperti sistem bertani, berkebun, pembuatan makanan tradisional yang memberikan warna bagi keberadaan sebuah desa wisata. Kemudian, lingkungan yang masih terjaga juga menjadi faktor penting yang harus dimiliki desa wisata. Putra dalam (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020) menambahkan pendapatnya bahwa desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang dapat dimanfaatkan keunggulannya dalam menawarkan keseluruhan suasana pedesaan, baik dari segi sosial budaya, adat istiadat, maupun kegiatan perekonomian menjadi suatu rangkaian kegiatan wisata.

Fandeli, Baiquni & Dewi dalam (Askani, Putri, Salehan, & Rahayu, 2023) menjelaskan bahwa desa wisata merupakan bentuk perkembangan pariwisata yang berfokus pada masyarakat setempat, pelestarian lingkungan, dan produk wisata dengan nilai budaya dan karakteristik tradisional yang masih melekat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Inskeep dalam (Askani, Putri, Salehan, & Rahayu, 2023) mengungkapkan bahwa desa wisata memiliki suasana tradisional yang masih dijaga untuk menarik perhatian wisatawan agar dapat mempelajari kehidupan masyarakat lokal.

Berdasarkan definisi desa wisata di atas, dapat disimpulkan bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan dengan potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata dengan tetap mempertahankan kehidupan asli masyarakat desa yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Sehingga, program desa wisata berbasis pada potensi lokal masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

1.6.6. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mas'ood dalam (Cahyaningrum, 2018), pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya kepada masyarakat. Hikmawan (2017) dalam (Pathony, 2019) menjelaskan lebih lanjut terkait pemberdayaan masyarakat sebagai upaya dalam memberikan penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang miskin akan sumber daya, kelompok masyarakat yang terabaikan dengan cara memberikan motivasi, fasilitas, dan mendorong mereka dalam mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Sedangkan tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2002) dalam (Pathony, 2019) yaitu:

1. Perbaikan Pendidikan: pemberdayaan dalam hal ini ditujukan sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik agar dapat meningkatkan semangat untuk belajar.
2. Perbaikan Aksesibilitas: berdasarkan pada pendidikan yang lebih baik diharapkan mampu memperbaiki aksesibilitas melalui sumber informasi dan inovasi.
3. Perbaikan Tindakan: dengan berbagai sumberdaya yang lebih baik, diharapkan mampu menciptakan tindakan-tindakan yang semakin baik.
4. Perbaikan Kelembagaan: perbaikan suatu tindakan diharapkan mampu memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
5. Perbaikan Usaha: perbaikan-perbaikan pada aspek-aspek sebelumnya diharapkan mampu memperbaiki bisnis yang akan dilakukan.

6. Perbaikan Pendapatan: terjadinya perbaikan bisnis diharapkan mampu memperbaiki pendapatan yang diterima.
7. Perbaikan Lingkungan: perbaikan pendapatan diharapkan mampu memperbaiki lingkungan, baik secara fisik maupun sosial.
8. Perbaikan Kehidupan: tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan mampu memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat.
9. Perbaikan Masyarakat: kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik diharapkan akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan karena tidak seluruh masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang sama. Masyarakat dengan kesejahteraan tinggi akan memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak bergantung pada pihak lain. Sedangkan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah cenderung memerlukan bantuan pihak lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak melalui bantuan yang bersifat mendidik (Maryani & Nainggolan, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pembangunan melalui penguatan yang diberikan kepada masyarakat agar secara inisiatif memperbaiki situasinya secara mandiri. Sehingga, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk mengubah kondisi yang lebih baik dari

sebelumnya. Pentingnya evaluasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengukur ketercapaian program.

1.6.7. *Community Based Tourism (CBT)*

Community Based Tourism diartikan sebagai pariwisata berbasis masyarakat. Menurut Agustin dalam (Septemuryantoro, Dima, & Rahayu, 2020), *Community Based Tourism (CBT)* merupakan kegiatan pengembangan pariwisata yang sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Ide kegiatan wisata dan manajemen pariwisata dilakukan oleh masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Pendapat tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Jamal & Stronza dalam (Iqbal, 2022) bahwa CBT merupakan konsep pengembangan suatu komunitas yang akan memberdayakan masyarakat pedesaan untuk memanfaatkan potensi sumber daya wisata yang tersedia dan memastikan bahwa masyarakat lokal akan melibatkan diri dalam kegiatan tersebut.

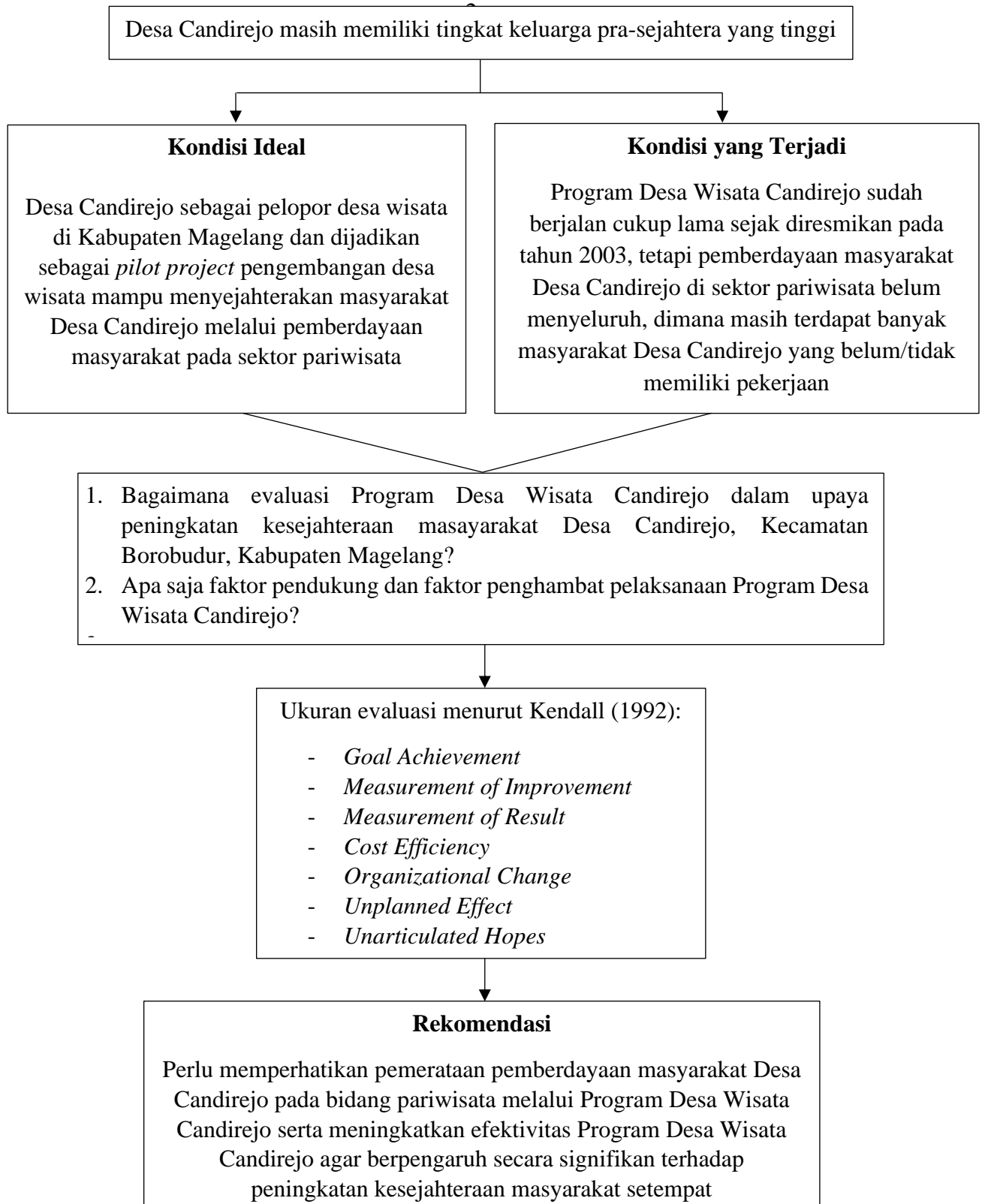
CBT menurut Baskoro dan Rukendi dalam (Umar, Sjamsuddin, & Rochmah, 2023) yaitu sebuah konsep pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan keterampilan dan kemampuan dalam pariwisata untuk menjadikan masyarakat paham akan asset yang mereka miliki, seperti adat istiadat, kebudayaan kuliner tradisional, dan gaya hidup lokal. Asset tersebut harus mampu diubah menjadi daya tarik utama dalam pariwisata, sehingga masyarakat dilibatkan dalam rangkaian ekonomi pariwisata. Chen et al dalam (Iqbal, 2022) menyatakan bahwa beberapa penelitian di berbagai negara membuktikan CBT membantu masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan ekonomi, pelestarian

adat, budaya, lingkungan alam sekitarnya, serta peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang menunjang perbaikan hidupnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CBT adalah pariwisata berbasis masyarakat yang memperkuat kemampuan masyarakat pedesaan dalam mengelola sumberdaya pariwisata dengan tujuan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui progress dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.6.8. Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian



1.7. Operasionalisasi Konsep

Evaluasi program ditujukan untuk menilai sejauh mana pencapaian Program Desa Wisata Candirejo dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Desa Wisata Candirejo agar sesuai dengan harapan berdasarkan responsivitas pihak terkait. Tahap evaluasi menjadi hal yang esensial untuk memantau pelaksanaan program. Dalam mengukur keberhasilan program, perlu dikaji melalui beberapa indikator. Penelitian ini menggunakan indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Kendall (1992) sebagai berikut:

1. *Goal Achievement*

- a. Pencapaian tujuan Program Desa Wisata Candirejo.

2. *Measurement of Improvement*

- a. Pengukuran sikap dan pengetahuan masyarakat Desa Candirejo terhadap desa wisata.

3. *Measurement Result*

- a. Dampak tingginya jumlah pengunjung Desa Wisata Candirejo.
- b. Penyediaan sarana prasarana wisata.

4. *Cost Efficiency*

- a. Efisiensi biaya pendapatan dan pengeluaran Koperasi Desa Wisata Candirejo.

5. *Organizational Change*

- a. Inovasi Pemasaran Wisata.

- b. Inovasi Organisasi.

6. *Unplanned Effect*

- a. Kekompakan dan semangat kerja Koperasi Desa Wisata Candirejo dan para pelaku wisata.

7. *Unarticulated Hopes*

- a. Harapan Koperasi Desa Wisata Candirejo yang tidak terartikulasikan.

Berdasarkan indikator evaluasi di atas, pelaksanaan Program Desa Wisata Candirejo dapat dilihat dari faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain yaitu:

1. Komunikasi
2. Partisipasi Masyarakat
3. Sumberdaya
4. Struktur Organisasi

1.8. Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan oleh keingintahuan peneliti mengenai evaluasi program Desa Wisata Candirejo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang serta faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Desa Wisata Candirejo. Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Candirejo merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan seni budaya. Untuk mengukur keberhasilan program, perlu dikaji melalui beberapa indikator. Peneliti

menggunakan model evaluasi yang dikemukakan oleh Kendall (1992) yang terdiri dari tujuh indikator, yaitu *Goal Achievement*, *Measurement of Improvement*, *Measurement Result*, *Cost Efficiency*, *Organizational Change*, *Unplanned Effect*, dan *Unarticulated Hopes*. Teori tersebut mampu menjelaskan secara komprehensif dalam mengevaluasi Program Desa Wisata Candirejo. Sehingga, tidak hanya melihat pada sisi kepentingan organisasi saja, tetapi juga melihat proses keberlangsungan program dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang bersangkutan. Kemudian, pelaksanaan program sebagai implementasi dari suatu kebijakan yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung maupun faktor penghambat, baik secara internal maupun eksternal.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena hasil data yang akan diperoleh benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Menurut (Abdussamad, 2021), penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam dengan mengkaji permasalahan secara khusus, bukan merupakan suatu generalisasi. Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Basrowi dan Suwandi dalam (Nugrahani, 2014) bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk menganalisis fenomena, peristiwa, maupun aktivitas sosial yang dideskripsikan secara urut dan sistematis yang disertai dengan catatan hasil wawancara mendalam dan hasil analisis dokumen. Sugiyono dalam (Alhamid & Anufia, 2019) menjelaskan lebih

lanjut bahwa penelitian kualitatif berfungsi dalam menentukan fokus penelitian, menetapkan informan sebagai sumber data, mengukur kualitas data, menganalisis data, menguraikan data dan merangkai kesimpulan.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Moh Nazir dalam (Rusandi & Rusli, 2021) mengatakan bahwa penelitian deskriptif dilakukan dengan menyusun secara sistematis dan tuntas dalam menggambarkan suatu permasalahan yang mengarah pada fenomena nyata di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih untuk menganalisis secara mendalam dan akurat terkait evaluasi Program Desa Wisata Candirejo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

1.9.2. Situs Penelitian

Lokus yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Wisata Candirejo di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Pemilihan lokus tersebut didasarkan pada keberadaan lokasi yang memenuhi persyaratan dan data-data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu evaluasi Program Desa Wisata Candirejo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu-individu yang berperan sebagai sumber informasi dan sumber data sesuai dengan permasalahan penelitian,

sehingga mempunyai kedudukan sentral (Abdussamad, 2021). Penentuan subjek dalam penelitian ini melalui teknik *purposive sampling*. Menurut (Sinaga, 2014), teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan peninjauan terhadap populasi yang dianggap cukup representatif untuk mewakilinya, sehingga bukan berdasarkan statistik. Dengan demikian, subjek penelitian dipilih berdasarkan pada pengetahuan dan kemampuan informan terkait permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, Kepala Desa Candirejo, Pengurus Koperasi Desa Wisata Candirejo, pelaku wisata dan masyarakat setempat yang tertera pada tabel informan berikut:

Tabel 1.5 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Arika Dyah Riza Umami, A.Md.	Pengelola Sarana Wisata Disparpora Kabupaten Magelang
2	S. Mulyanto, S.E	Kepala Desa Candirejo
3	Ahmad Mudhofar Ersyidik	Sekretaris Koperasi Desa Wisata Candirejo
4	Triyani	<i>Local Guide</i> Desa Wisata Candirejo
5	Angga Fahrur	Pengelola Balkondes
6	Mamad	Pedagang

Pemilihan informan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dengan alasan Disparpora Kabupaten Magelang berperan sebagai regulator sekaligus kontroler pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang. Kemudian, Kepala Desa Candirejo merupakan pelaksana pembangunan desa yang paham akan kondisi

desa terkait pelaksanaan kegiatan pariwisata di Desa Candirejo. Sedangkan Pengurus Koperasi Desa Wisata Candirejo merupakan penanggungjawab pengelolaan Desa Wisata Candirejo yang memberikan pedoman bagi pengembangan desa wisata sesuai dengan perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya, terdapat pelaku wisata sebagai pelaksana program dan masyarakat Desa Candirejo yang dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan Program Desa Wisata Candirejo.

1.9.4. Jenis Data

Penelitian ini memerlukan berbagai jenis data dalam menunjang hasil penelitian. Untuk mendapatkan informasi penelitian mengenai “Evaluasi Program Desa Wisata Candirejo Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang”, maka akan digunakan data-data yang bersumber dari penjelasan langsung oleh informan, pengamatan tindakan informan, hasil observasi lingkungan, serta dokumentasi sebagai penunjang data. Penelitian ini kemudian akan menghasilkan data deskriptif dari perolehan data-data di lapangan.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data berasal dari data-data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian (Wahidmurni, 2017). Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut.

a. Data Primer

Moleong dalam (Rijali, 2018) menyampaikan bahwa data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber secara langsung pada saat terjun lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kata-kata, tindakan dan aktivitas dari para informan, yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, Kepala Desa Candirejo, Pengurus Koperasi Desa Wisata Candirejo, pelaku wisata dan pedagang yang diamati dan diwawancari secara mendalam serta dilakukan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian (Moleong dalam Rijali, 2018). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, artikel jurnal, berita, dokumen, regulasi, serta situs di internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah penting karena mendapatkan data merupakan tujuan utama dalam penelitian (Pahleviannur, et al., 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Susan Stainback dalam (Pahleviannur, et al., 2022) menyampaikan bahwa melalui wawancara akan diketahui hal-hal yang terperinci mengenai informan dalam menjelaskan situasi dan fenomena yang tidak dapat ditemukan melalui

observasi. Wawancara sendiri merupakan dialog antara dua orang dalam rangka bertukar informasi terkait topik tertentu melalui tanya jawab (Esterberg dalam Pahleviannur, et al., 2022). Dalam hal ini, dilakukan wawancara secara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan mempersiapkan instrument pertanyaan terlebih dahulu, kemudian para informan dapat memberikan pendapatnya secara lebih bebas dan terbuka dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara secara mendalam dilaksanakan dengan menyajikan beberapa pertanyaan kepada informan, yaitu pada Disparpora Kabupaten Magelang, Kepala Desa Candirejo, Pengurus Koperasi Desa Wisata Candirejo, pelaku wisata dan pedagang menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Peneliti mencatat jawaban yang diperoleh dan juga menggunakan alat bantu perekam suara.

b. Observasi

Menurut Nasution dalam (Pahleviannur, et al., 2022), observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat suatu peristiwa secara langsung. Penelitian ini menggunakan jenis observasi langsung atau observasi partisipan, yaitu peneliti mengikuti salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat setempat dalam kapasitas sebagai pengamat. Tujuan dari pembuatan lembar observasi yaitu untuk merekam aktivitas informan dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Desa Wisata Candirejo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan sebagai pelengkap data wawancara dan observasi dengan mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan, berupa

data yang tersimpan dalam server maupun website, hasil notulen rapat, aturan lembaga, perekaman hasil wawancara, pengambilan gambar, serta pendokumentasian arsip-arsip yang tersedia.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Nugrahani, 2014) dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data: menghimpun data-data di Desa Wisata Candirejo melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan strategi pengumpulan data yang dirasa tepat.
- b. Reduksi data: pemillihan, pendalaman, pengolahan, dan transformasi data kasar yang ada di lapangan untuk menghasilkan catatan-catatan yang mendetail.
- c. Penyajian data: data disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis dan sistematis mengenai keterkaitan kegiatan, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian dan penarikan kesimpulan.
- d. Penarikan kesimpulan: penafsiran terhadap analisis dan interpretasi data dengan penyusunan pola pengarah dan sebab akibat yang mendukung jawaban permasalahan penelitian berdasarkan hasil temuan di lapangan.

1.9.8. Kualitas Data

Untuk menguji kualitas data penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu pengecekan hasil penelitian melalui

wawancara dengan beberapa sumber, kemudian dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi (Sidiq & Choiri, 2019). Dengan demikian, peneliti dapat membandingkan hasil wawancara beberapa sumber dengan teknik pengumpulan data tersebut agar perolehan data dapat dilakukan *recheck* hasil temuan untuk mendapat hasil yang terpercaya dan mencegah subjektivitas.